

IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN DAERAH HINTERLAND KOTA PALEMBANG

IMELDA

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

Many reason had been delivered for split policy implementation on a region. Started from economic growth does not appear everywhere and all at once; it appear in points or development poles with variable intensities. The development gap between Palembang Seberang Ulu and Palembang Seberang Hilir is still an unsolved problem. Therefore, need a way out in resolving this problem, that is establish new growth centers in the Palembang city.

Base on the focus point, this research purposed to identify the growth center and hinterland on Palembang City at South Sumatera. The data obtain from Central Board of Statistics by using Scalogram analysis to determine the services center based on number and type of units of facilities that exist in any area. The conclusion is the sub-district as the center of economy growth interacting each other with the surrounding sub-district as hinterland.

Keywords: Growth Center, Hinterland, Scalogram analysis.

PENDAHULUAN

Semakin menggeliatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palembang merupakan upaya pemerintah kota untuk terus menerus meningkatkan kemajuan daerahnya menjadi kota metropolis dan internasional. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata.

Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan pembangunan. Dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi maka pembangunan akan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah sehingga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi.

Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tersebut, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Dalam pendistribusian secara spasial ekonomi, kekuatan pasar akan dijamin keseimbangannya. Selain itu, proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan pedesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan munculnya perusahaan--perusahaan besar. Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dengan basis sumberdaya di wilayah pedesaan, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh.

Dengan kata lain, adanya pusat pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu, bagaimana hasil produksi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut, dapat dipakai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil di pusat pertumbuhan tersebut menjadi generator untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah sekitar.

Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan menjadi pusat pertumbuhan daerah merupakan salah satu kota metropolis di Indonesia. Secara geografis, di sebelah utara, timur dan barat Palembang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis secara internasional. Jarak tempuh Palembang dengan Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia sama dengan jarak tempuh Palembang menuju Jakarta, ibukota Negara. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan diharapkan Palembang dapat memberikan *spread effect* bagi daerah belakangnya (*hinterland*) di Sumatera Selatan terutama bagi daerah yang berbatasan langsung dengan Palembang yang dikenal dengan istilah **Patung Sang Jaya**, yaitu akronim dari Palembang, Betung, Sungsang, Jejawi, dan Indralaya.

Dengan peranan strategisnya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian regional kawasan barat Indonesia maka menarik untuk mengkaji dan menganalisis interaksi ekonomi Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan dengan mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut dan kecamatan-kecamatan *hinterland*nya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan membahas tentang kecamatan manakah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan *hinterland* di Palembang ?

TINJAUAN PUSTAKA

Secara konsepsi wilayah didefinisikan sebagai ruang yang memiliki kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Demikian pula definisi wilayah menurut Rustiadi, et al. (2006), bahwa wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Berdasarkan batasan tersebut, maka wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Karakteristik wilayah mencakup komponen: biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap wilayah pada hakekatnya merupakan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Menurut Tarigan (2005), suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar perwilayahan dibedakan menjadi :

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogeneity*). Contoh yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan (*growth centre*) yang sama besar/rankingnya, kemudian ditetapkan batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan.

Perkembangan modern konsep atau pusat pertumbuhan (*growth point concept*) terutama berasal dari teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis yaitu Francis Perroux dengan teorinya *pole croisanse* atau *pole de development*. Pemikiran dasar teori ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat). Kegiatan ekonomi tersebut akan semakin berkurang pengaruhnya jika semakin menjauh dari pusat pertumbuhan tersebut. Akhirnya, pusat tersebut dapat dikatakan sebagai titik pertumbuhan sedangkan daerah sekitarnya yang masih terpengaruh adalah daerah pengaruhnya.

Menurut Sihotang (2001), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikian, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut. Selain itu, pusat-pusat penduduk yang besar mempunyai potensi pasar yang tinggi dan secara kultural dan sosial lebih menarik untuk dikembangkan. Dengan demikian, titik pertumbuhan biasanya terjadi secara alami dan kemudian dikembangkan sehingga peningkatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut amat tergantung dari penggunaan sumber daya yang digunakan pada titik dan daerah pengaruhnya.

Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Konsep titik pertumbuhan (*growth point concept*) adalah merupakan mata rantai antara struktur daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan perencanaan fisik dan regional. Sebagaimana telah diketahui, keuntungan-keuntungan aglomerasi menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien dari pada yang terpencar-pencar, sedangkan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan skala dalam penyediaan pelayanan-pelayanan sentral dan keinginan akan kemudahan hubungan telah mengakibatkan konsentrasi penduduk yang tersusun dalam suatu hirarki difokuskannya pusat-pusat sub-regional bagi pertumbuhan telah membantu menjembatani celah antara teori lokasi dan teori ekonomi regional. Selain itu juga memasukkan unsur kesatuan dan pengarahan ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan regional seperti: pembuatan prasarana pada titik-titik pertumbuhan, lokasi perumahan baru, dan penggairahan migrasi intra-regional dan perjalanan ke tempat kerja ke pusat-pusat yang direncanakan.

Pemikiran dasar dari titik pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah titik-titik tokal. Di dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik tokal ini, walaupun kepadatan dari arus tersebut akan berkurang karena jarak. Di sekitar titik tokal (pusat dominan) kita dapat menentukan garis perbatasan dimana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dinamakan sebagai titik pertumbuhan, sedangkan wilayah di dalam garis perbatasan merupakan wilayah pengaruhnya (wilayah pertumbuhan).

Berdasarkan penafsiran di atas, distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hirarki dan kaitan-kaitan fungsional. Semakin kuat ciri-ciri nodal dari wilayah-wilayah yang bersangkutan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan demikian juga halnya

dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosialnya. Dengan demikian rencana pengembangan wilayah akan lebih berhasil jika rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat ciri-ciri titik pertumbuhan alamiah yang terdapat di masing-masing wilayah. Strategi titik pertumbuhan dapat ditafsirkan sebagai upaya mengkombinasikan ciri-ciri tempat sentral yang mempunyai orde tinggi dan lokasi potensial yang akan memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi.

Teori Tempat Sentral menyatakan fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya yang mengemban fungsi sosial-ekonomi bertindak untuk melayani daerah hinterlandnya (desa atau kota lainnya yang mempunyai pengaruh hubungan yang kuat). Kota yang mampu melayani masyarakat kota sering disebut fungsi kota, yang selalu dikaitkan dengan sosial ekonomi utama suatu kota. Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya, disamping itu kota ditinjau dari segi aksesibilitasnya ke kota-kota lain atau wilayah belakangnya. Pola ideal yang diharapkan terbentuk, asumsi homogen dalam hal bentuk medan, kualitas tanah dan tingkat ekonomi penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (hexagonal). Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Haggett, 2001).

Kota sebagai pusat pelayanan juga, diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti; (1) pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota, (2) sarana dan prasarana transportasi, (3) tempat rekreasi dan olah raga, dan (4) sarana pendidikan, kesehatan dan obyek wisata. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan dalam kota (Jayadinata, 1992).

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penduduk. Semakin lengkap penyediaan fasilitas-fasilitas di suatu tempat berarti semakin kuat daya tarik mengundang penduduk dan kegiatan-kegiatan produktif untuk datang ke tempat tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan wilayah harus diupayakan untuk memanfaatkan peran kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Ada dua faktor penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan peran pusat-pusat dan hirarki dari masing-masing pusat. Pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil adalah penghubung antara pusat-pusat pelayanan yang lebih besar dengan daerah pedesaan.

John Friedman, Weaver, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery region*. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitarnya.

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Wilayah pusat merupakan subsistem dari kemajuan pembangunan yang ditentukan oleh lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang sub stansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial yang lengkap (Indra Catri, 1993, Murtomo, 1988). Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu: 1) Pusat pertumbuhan primer (utama) Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. 2) Pusat pertumbuhan sekunder (kedua). Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub-

daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini. 3) Pusat pertumbuhan tersier (ketiga). Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya (Friedmann, 1966).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta interaksi kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lainnya sebagai pendukungnya (*hinterland*) di Kota Palembang. Periode penelitian pada satu titik waktu yaitu kondisi Kota Palembang tahun 2011-2012. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi indikator suatu daerah dikategorikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dari adanya keuntungan konsentrasi perkotaan yang meliputi diantaranya fasilitas-fasilitas komersial, perbankan dan finansial, transportasi, komunikasi, adanya fasilitas-fasilitas sosial, hiburan dan keuntungan skala dalam pelayanan umum oleh pemerintah (Sitohang, 2001). Dengan menggunakan analisis *Scalogram* dapat diidentifikasi kecamatan yang dapat dikelompokkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang dimiliki. Mampu tidaknya suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan dapat dilihat dari fasilitas perkotaan yang dimilikinya (Blakely, 1999).

Analisis *Scalogram* bertujuan untuk mengidentifikasikan peranan suatu kota berdasarkan pada kemampuan kota tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin lengkap pelayanan yang diberikan, menunjukkan bahwa kota tersebut mempunyai tingkatan yang tinggi dan dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003). The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu: 1) infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. 3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Fasilitas kota selain mampu membentuk struktur fisik kota, juga dibutuhkan sebagai wadah aktivitas baik ekonomi maupun sosial sehari-hari bagi masyarakat setempat (Morris, 2000). Menurut *United Nations* (1979), fasilitas yang harus tersedia diantaranya adalah fasilitas: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos dan telekomunikasi, perumahan, persampahan, drainase, listrik, serta jalan. Fasilitas harus merinci ruang lingkup pelayanan, jumlah dan kualitas fasilitas untuk masing-masing kelompok umur, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya. Pendekatannya dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya fasilitas tersebut. Fasilitas

yang dibutuhkan dalam suatu kota kecamatan menurut standar DPU dapat dilihat pada tabel 1.

Metode skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Amas Yamin, dkk dalam Pardede, 2008). Dalam analisis skalogram ini subjek diganti dengan pusat permukiman (*settlement*). Sedangkan objek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk, jumlah jenis jumlah unit.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram adalah (Pardede, 2008) : 1) Daerah-daerah di kecamatan yang ada di Palembang disusun berdasarkan peringkat jumlah penduduk. 2) Daerah-daerah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki. 3) Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut. Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.

Tabel 1. Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Kecamatan

No	Jenis Fasilitas	Minimum Penduduk Pendukung	Radius Pencapaian
1 Pendidikan	SD/MI	1.600 jiwa	1.000 m
	SMP/MTs	4.800 jiwa	-
	SMA/MA	4.800 jiwa	-
2 Kesehatan	Praktek dokter	5.000 jiwa	1.500 m
	Puskesmas pembantu	3 0.000 jiwa	-
	Puskesmas + rawat inap	120.000 jiwa	-
	Rumah sakit bersalin/BKIA	10.000 jiwa	2000 m
	Apotek	10.000 jiwa	-
3 Perekonomian	Pusat perbelanjaan dan niaga (pertokoan, pasar, bank, kantor, industri kecil)	120.000 jiwa	-
4 Pemerintahan dan pelayanan umum	Kantor kecamatan, kantor polisi, kantor pos cabang, kantor telepon, pemadam kebakaran	120.000 jiwa	-
6 Peribadatan *)	Musholla	300 jiwa	-
	Masjid	1.750 jiwa	-
	Masjid Besar	120.000 jiwa	-
	Gereja	1.750 jiwa	-
	Pura	120.000 jiwa	-
	Wihara	120.000 jiwa	-
7 Olah raga dan daerah terbuka	Taman dan lapangan terbuka	120.000 jiwa	-
8 Kebudayaan dan rekreasi	Gedung serba guna	120.000 jiwa	-
9 Transportasi	Terminal	120.000 jiwa	-

Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota

*) Tergantung dari kondisi setempat (jumlah dan jenis agama yang dianut)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kota Palembang terletak pada posisi antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah 400.61 km² atau 40.061 Ha.

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin.
 Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin.
 Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
 Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim.

Apabila dilihat secara topografi, Kota Palembang terletak pada posisi belahan Timur Pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawa, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir. Pada bagian wilayah Seberang Ilir adanya variasi topografi (ketinggian) 4 sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut dan lembah-lembah yang kontinyu serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai dengan jarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif menaik dan setelah itu semakin ke Utara menurun kembali. Sebaliknya, Seberang Ulu umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi (+ 3,5 M sampai 4,12 M di atas permukaan laut) kecuali lahan yang telah di bangun dan akan dibangun, dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan (reklamasi). Dengan demikian, aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kelerengan atau kemiringan yang besar.

Jumlah Penduduk Kota Palembang pada Januari 2013 sebanyak 1.703.740 yang terdiri dari 868.197 laki-laki dan 840.216 perempuan, sedangkan jumlah penduduk pertengahan tahun 2010 berdasarkan hasil SP2010 dari Badan Statistik berjumlah 1.455.284 dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan SP 2010 terhadap jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 1.70%. Penyebaran penduduk Kota Palembang tidak merata. Konsentrasi penduduk masih bertumpu di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Rincian jumlah penduduk Kota Palembang per kecamatan dapat dilihat dari Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ilir Barat II	37.918	36.761	74.679
2	Seberang Ulu I	94.867	92.183	187.050
3	Seberang Ulu II	53.166	51.202	104.368
4	Ilir Barat I	74.040	72.755	146.795
5	Ilir Timur I	39.387	40.267	79.654
6	Ilir Timur II	98.773	96.087	194.860
7	Sukarami	79.543	76.966	156.509
8	Sako	48.548	46.931	95.479
g	Kemuning	47.415	46.319	93.734
10	Kalidoni	62.596	59.409	122.005
11	Bukit Kecil	25.248	25.243	50.491
12	Gandus	34.600	32.876	67.476
13	Kertapati	50.911	48.666	99.577
14	Plaju	48.880	47.394	96.274
15	Alang-Alang Lebar	48.307	47.091	95.398
16	Sematang Borang	20.087	19.304	39.391
Total		864.286	839.454	1.703.740

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sarana Pendidikan seperti jumlah Sekolah di Kota Palembang baik Negeri maupun Swasta pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 1.142 sarana pendidikan yang terdiri dari 294 sekolah taman kanak-kanak, 358 Sekolah Dasar/Madarasah ibtidaiah (SD/MI), 198 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 162 Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah (SMU/MA), 63 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/ Universitas. Dengan besarnya jumlah penduduk maka ketersediaan sarana kesehatan menjadi penting. Jumlah fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik bersalin dan puskesmas keliling pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 26 unit, 39 Unit, 70 Unit, 32 unit dan 20 unit dari fasilitas tersebut diharapkan peningkatan kesehatan masyarakat kota Palembang semakin meningkat.

Selain sarana kesehatan juga dibutuhkan fasilitas sosial lainnya. Salah satu fasilitas sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlah panti asuhan yang dikelola swasta dan pemerintah di Kota Palembang sebanyak 7 (tujuh) panti dengan jumlah penghuni sebanyak 431 orang. Rincian masing-masing panti asuhan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Panti Asuhan dan Jumlah Penghuni Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2012

No	Jenis Panti	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Panti Sosial Bina Anak Remaja (PSBAR)	-	20	20
2	Panti sosial rehabilitasi tresna Werdha Teratai (PTWT)	31	41	72
3	Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan orang telantar	88	68	156
4	Panti Rehabilisasi penderita cacat Netra (PRPCN)	25	20	45
5	Panti rehabilitasi anak-anak Nusantara	19	1	20
Jumlah		163	150	313

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Secara administratif Kota Palembang sejak tahun 2007 dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

1. Kecamatan Ilir Timur I : 11 Kelurahan
2. Kecamatan Kemuning : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Ilir Timur II : 12 Kelurahan
4. Kecamatan Kalidoni : 5 Kelurahan
5. Kecamatan Ilir Barat I : 6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Kecil : 6 Kelurahan
7. Kecamatan Ilir Barat II : 7 Kelurahan
8. Kecamatan Gandus : 5 Kelurahan
9. Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan
10. Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan

11. Kecamatan Seberang Ulu II	: 7	Kelurahan
12. Kecamatan Plaju	: 7	Kelurahan
13. Kecamatan Sako	: 4	Kelurahan
14. Kecamatan Sukarami	: 7	Kelurahan
15. Kecamatan Alang-Alang Lebar	: 4	Kelurahan
16. Kecamatan Sematang Borang	: 4	Kelurahan

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 4 Asisten, 11 Bagian, Sekretariat DPRD, Inspektur, 17 Dinas, 1 Satuan, 9 badan, 3 BUMD dan 1 kantor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang.

Profil Ekonomi

Dengan semakin membaiknya perekonomian global, maka kondisi perekonomian Kota Palembang di tahun 2012 pada dasarnya juga stabil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang mencerminkan gambaran penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi di Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang
Tahun 2012 (Dalam Juta Rupiah)**

Sektor	ADH Berlaku	ADH Konstan
Pertanian	290.729	134.197
Pertambangan dan Penggalian	0	0
Industri Pengolahan	29.661.198	7.352.747
Listrik, Gas dan Air Bersih	803.952	295.031
Bangunan	4.985.935	1.894.580
Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.223.737	4.149.525
Pengangkutan dan Komunikasi	7.398.356	3.537.820
Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	3.996.915	1.517.537
9. Jasa-jasa lainnya	8.574.395	2.542.643
PDRB dengan Migas	66.935.210	21.424.079
PDRB tanpa Migas	51.433.657	19.493.524

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (angka sangat- sangat sementara
Per 11 Maret 2013 belum di publikasikan dan masih akan berubah)

Berdasarkan kontribusi atau peranan masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam konteks yang lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor perekonomian dapat dilihat struktur ekonomi Kota Palembang. Berdasarkan pendekatan produksi, seluruh sektor lapangan usaha yang ada di suatu wilayah biasanya di kelompokkan dalam 9 sektor. Kesembilan sektor tersebut dapat diklasifikasikan kembali dalam tiga sektor utama, yaitu **Sektor Primer, Sekunder, Tersier**. Sektor **Primer** mencakup kegiatan pertanian, Pertambangan, dan penggalian. Sektor **Sekunder** meliputi kegiatan industri

pengolahan, listrik, Gas dan air bersih serta bangunan. **Sektor Tersier** mencakup kegiatan Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Adapun struktur Ekonomi Kota Palembang masih didominasi oleh sektor sekunder. Tabel 5 menyajikan struktur ekonomi menurut sektor Primer, Sekunder dan Tersier.

Tabel 5. Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012

Sektor	Persentase
Primer	0.43
Sekunder	52.96
Tersier	46.7
Jumlah	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (angka sangat-sangat sementara)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja ekonomi daerah serta dapat menunjukkan arah kebijakan pembangunan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Krisis global yang terjadi di tahun 2008 cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Pada beberapa sektor ekonomi laju pertumbuhan melambat dari tahun sebelumnya, yang pada akhirnya mengakibatkan total pertumbuhan ekonomi Kota Palembang lebih kecil. Laju pertumbuhan tertinggi PDRB Kota Palembang Tahun 2012 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 12.11%.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor Tahun 2009-2012

Sektor	2009	2010	2011	2012*
Pertanian	3.12	2.30	2.77	2.86
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	4.02	4.44	5.89	7.17
Listrik, Gas dan Air Bersih	3.53	6.22	8.35	8.57
Bangunan	7.12	8.03	18.46	10.73
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.79	6.67	7.84	7.11
Pengangkutan dan Komunikasi	11.63	11.23	14.71	12.11
Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan	8.57	7.79	16.34	4.27
9. Jasa-jasa lainnya	6.10	6.10	9.43	7.68
PDRB dengan Migas	5.60	6.60	9.79	8.09
PDRB tanpa Migas	6.42	7.37	10.85	8.92

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (*angka sangat sementara per Maret 2012)

Pendapatan perkapita adalah jumlah seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima setiap penduduk secara rata-rata dalam keterlibatannya pada faktor produksi dalam proses produksi sehingga sering digunakan sebagai indikator dalam melihat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat secara umum. Berdasarkan harga konstan dengan migas,

pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang di tahun 2012 naik sebesar Rp 606.656,00 atau naik dari Rp 11.051.444,00 tahun 2011 menjadi Rp11.658.100,00 di tahun 2012. Apabila unsur migas dikeluarkan, maka pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp628.155,00 atau naik dari Rp9.979.416,00 di tahun 2011 menjadi Rp10.607.571 .00 pada tahun 2012. Pendapatan regional perkapita Kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang Tahun 2007-2012

Tahun	Dengan Harga Berlaku		Dengan Harga Konstan	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2007	20.230.261	14.109.410	8.813.166	7.710.612
2008 ^r	24.462.150	16.543.143	9.276.634	8.173.198
2009 ^r	25.918.790	18.288.409	9.647.392	8.565.981
2010*	29.520.621	20.794.780	10.168.303	9.093.569
2011**	32.670.008	25.273.653	11.051.444	9.979.416
2012***	36.423.380	27.988.074	11.658.100	10.607.571

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Ket: r. Angka revisi, *angka sementara, ** angka sangat sementara,

***angka sangatsangat sementara, per Maret 2012)

Pusat Pertumbuhan Kota Palembang

Berdasarkan konsentrasi penduduk dapat dilihat bahwa persebaran penduduk tidak merata dan terpusat di Kecamatan ilir timur II (194860 orang, 11,45 persen), diikuti oleh Kecamatan Seberang Ulu i (187.050 orang, 10,97 persen) dan Sukarami (156.509 orang, 9,2 persen). Tingginya penduduk di tiga Kecamatan ini karena di Kecamatan tersebut merupakan sentra industri dan sentra Pendidikan serta dipengaruhi perbatasan dengan Kabupaten lain atau daerah pinggiran Kota. Tabel 4.7 menyajikan informasi tentang persebaran UKM di Kota Palembang menurut kecamatan tahun 2012 yang memperlihatkan bahwa letak UKM paling banyak ada di Kecamatan Ilir Timur II dan Sukarami. Jumlah UKM berdasarkan kelompok industri yang terbesar sebarannya di Kecamatan Gandus, Kertapati, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Sako dan Sukarami. Dengan kelompok industri terbesar adalah kelompok UKM industri logam, mesin, kimia dan aneka industri (89 unit usaha); dan UKM industri hasil hutan dan perkebunan (10 unit usaha).

Tingginya konsentrasi penduduk tersebut menyebabkan tingginya permintaan ketersediaan fasilitas umum baik sosial, ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, jumlah penduduk yang banyak juga menjadi pasar potensial sehingga pasar dan sentra produksi pun akan meletakkan lokasi mendekati konsentrasi penduduk.

Jika dibagi menurut lokasi wilayah, maka pusat pertumbuhan Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sukarami, Seberang Ulu II, Kalidoni dan Ilir Barat dan II. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari metode Scalogram pada Tabel 8. Ketersediaan fasilitas sosial paling banyak di Kecamatan Ilir barat I, untuk fasilitas ekonomi di Ilir Timur I dan pemerintahan di Ilir Timur II. Namun, dari tabel tersebut terlihat bahwa pusat pertumbuhan di Kota Palembang masih terkonsentrasi (primer) di dua kecamatan saja yaitu Ilir Timur I dan II dibandingkan 16 kecamatan yang ada. Baru kemudian diikuti pusat pertumbuhan kedua (sekunder) oleh Kecamatan Ilir Barat 1 dan II (sebelah barat Palembang), Sukarami (Sebelah Utara Palembang), Kalidoni (Sebelah Timur), dan Seberang Ulu 2 (Sebelah Selatan

Palembang) dan Sako (Sebelah Timur Palembang), sedangkan yang lainnya menjadi daerah *hinterland* di Kota Palembang. Dilihat dari perkembangan dari daerah sekunder, maka Kecamatan Ilir Barat 1 dan II, Sukarami, Kalidoni, dan Seberang Ulu 2 akan dapat menjadi daerah primer berikutnya.

Tabel 8. Nilai Fasilitas Metode Scalogram

Kecamatan	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan	Jumlah	Rerata
Ilir Barat II	1522	457	257	2236	1118
Gandus	1049	129	225	1403	701,5
Seberang Ulu I	1003	220	267	1490	795
Kertapati	922	184	256	1362	681
Seberang Ulu II	1086	156	287	1529	764,5
Plaju	919	121	257	1297	648,5
Ilir Barat I	1719	606	287	2612	1306
Bukit Kecil	1039	241	236	1516	758
Ilir Timur I	1341	1024	341	2706	1353
Kemunings	765	364	256	1385	692,5
Ilir Timur II	1362	789	362	2513	1256,5
Kalidoni	687	263	245	1195	597,5
Sako	473	128	255	856	428
Sematang Borang	309	50	240	599	299,5
Sukarami	1216	636	274	2126	1063
Alang-alang Lebar	530	533	234	1297	648,5

Sumber: Data diolah, 2013

Yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru pada bagian wilayah utara Palembang Kecamatan Seberang Ulu I dan II (wilayah Jakabaring), sebelah timur Palembang adalah Kalidoni dan Sako, sebelah utara Palembang adalah Sukarami dan Alang-Alang Lebar, serta sebelah Barat Palembang adalah Gandus.

PENUTUP

Kesimpulan

Pusat pertumbuhan primer di Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sekunder adalah Kecamatan Ilir Barat 1 dan II (sebelah barat Palembang), Sukarami (Sebelah Utara Palembang), Kalidoni (Sebelah Timur), dan Seberang Ulu 2 (Sebelah Selatan Palembang) dan Sako (Sebelah Timur Palembang) sedangkan kecamatan lainnya adalah *hinterland* Kota Palembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Blakeley, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, USA, Second edition, : SAGE Publication Inc.
- BPS Sumatera Selatan, *Palembang Dalam Angka 2011*.
- BPS Sumatera Selatan, *Palembang Dalam Angka 2012*.

- BPS, *Sumatera Selatan Dalam Angka 2011*.
- BPS, *Sumatera Selatan Dalam Angka 2012*.
- Djojodipuro, Marsudi. 1994. *Teori Lokasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Glasson, J. 1974. *An Introduction to Regional Planning*. Hutchinson Educational, London
- Harahap, Erwin, 2009. *Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan di kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Universitas Sumatera Utara.
- Hestuadiputri, Dita. 2007. *Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang*. Tesis. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kodoatie, RJ. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Myrdal, G. 1968. *Asian Drama-An Inquiry into The Poverty of Nations*, Penguin, Harmondsworth.
- Perroux, F. 1950. *Note Sur La Motion de Pole la Groissance*. *Economic Applioq-uce*, Vol. 8.
- Prasetyo, 2009. Rindang Bangun dan Muhammad Firdaus, Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2 (2) 222-236.
- Richardson, H.W., 1977. *Dasar-dasar Ekonomi Regional*. LPFEUI, Jakarta.
- Rustiadi E, Hadi S. 2006. *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang dalam Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*, Crestpent Press, P4W-LPPM IPB, Bogor
- Sibarani, M.H.M. 2002. *Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tesis Magister Sains. Program Pascarsarjana, universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitohang, Paul. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Edisi Revisi, Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Sugiyanto dan Sukesu, 2010. Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamansu, *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2010, 222-215
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- . 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta
- United Nations. 1978. *Guidelines for Rural Centre Plalning* Economic and Social Comissions for Asia and The Pasific. New York.
- Yanuar, R. 2006. *Kaitan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*. Tesis Magsiter Sains. Program Pascasarjana IPB,